

## Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kasus di Kota Yogyakarta

\* Kurnia Gischa Tristiya<sup>1</sup>, Ashilly Achidsti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Departemen Administrasi Publik, Universitas Negeri Yogyakarta

Dikirimkan: 15 Desember 2025

Direvisi: 12 Juni 2026

Diterbitkan: 12 Juni 2026

### INTISARI

Penelitian ini mengkaji implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya kasus keracunan massal para siswa dengan melihat berbagai tantangan pelaksanaan. Meskipun berbagai studi penelitian sebelumnya telah membahas program MBG, khususnya pada kasus keracunan, kajian tersebut umumnya menitikberatkan pada tinjauan hukum. Alhasil, penelitian ini dapat berkontribusi untuk mengisi *research gap* dalam memperluas kajian implementasi kebijakan publik dengan menghadirkan analisis program MBG melalui perspektif struktural dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Identifikasi dilakukan dengan pendekatan teori George C. Edward III, yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas kebijakan publik, di mana kesiapan seluruh *stakeholders* dan struktur pelaksana belum dijalankan secara optimal. Penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terkait implementasi program MBG karena kepercayaan masyarakat sangat krusial bagi pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan implementasi program MBG di Kota Yogyakarta melalui peningkatan komunikasi antar *stakeholders*, penguatan kapasitas SDM, penegakan SOP dan pengawasan, penataan struktur birokrasi, serta perbaikan sistem jadwal produksi dan distribusi secara terintegrasi agar program berjalan lebih efektif, aman, dan terkoordinasi.

### KATA KUNCI

Kebijakan Publik; Makan Bergizi Gratis; Implementasi Program MBG; Kota Yogyakarta

### PENDAHULUAN

Pergantian rezim pemerintah umumnya diikuti dengan munculnya berbagai kebijakan baru yang diproyeksikan sebagai upaya perbaikan terhadap persoalan yang

---

#### Korespondensi:

Departemen Administrasi Publik, Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

Email: kurniagischa.2023@student.uny.ac.id

belum terselesaikan pada periode sebelumnya (Adhisatya & Firdaus, 2021). Program-program prioritas diperkenalkan sebagai bagian dari agenda untuk menunjukkan orientasi perubahan dan komitmen pemerintah baru dalam menjawab kebutuhan publik. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa perubahan kepemimpinan sering kali diikuti oleh pergeseran fokus kebijakan serta munculnya berbagai program strategis yang menjadi fokus kebijakan serta munculnya berbagai program strategis yang menjadi prioritas pemerintah. Keberhasilan program-program tersebut tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di tingkat pelaksana (Fauzi dkk., 2026).

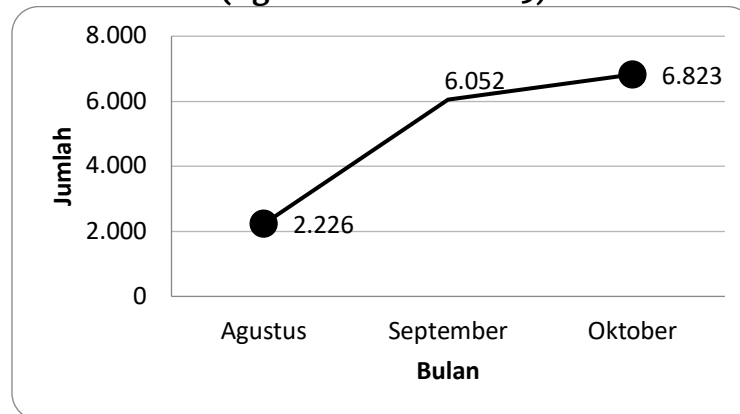
Dalam dinamika politik dan pembangunan nasional pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah mulai memperkenalkan sejumlah program prioritas yang mendapatkan perhatian publik. Berbagai respons muncul seiring implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Diantara kebijakan yang mendapat sorotan, MBG menjadi salah satu program strategis yang diproyeksikan untuk meningkatkan status gizi masyarakat serta mempercepat proses penurunan angka stunting dalam upaya penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurut Prabowo, program MBG ini dilatarbelakangi oleh 25% anak Indonesia yang belum memiliki akses yang cukup terhadap kebutuhan makan bergizi (Rahmah dkk., 2025). Kelompok rentan dan masyarakat daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) menganggap program MBG dapat meringankan kebutuhan pangan sehingga pemerintahan Prabowo Gibran memperoleh mandat publik dalam merealisasikan kebijakan tersebut (Pratiwi dkk., 2025).

Program MBG merupakan sebuah inisiatif kebijakan dari pemerintah yang ditujukan untuk memberikan akses makanan sehat secara gratis kepada kelompok masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Hal ini menjadi bagian dari strategi meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial dengan sasaran utama pemenuhan gizi harian, penurunan angka stunting, dan peningkatan kehadiran serta fokus belajar siswa (Rahmah dkk., 2025). Di samping itu, tidak semua keluarga mampu menyediakan makanan sehat setiap hari karena keterbatasan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah siswa yang berangkat ke sekolah tanpa memperoleh asupan sarapan memadai, sehingga mampu mengurangi konsentrasi pemahaman pembelajaran (Salsabila & Nareswari, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan gizi yang dapat berdampak pada kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Secara konseptual, program MBG diproyeksikan sebagai intervensi pemerintah untuk menangani permasalahan malnutrisi di tingkat nasional (Sarjito, 2024). Meskipun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan kebijakan. Beberapa kasus keracunan makanan dan kendala distribusi yang terjadi di sejumlah daerah menunjukkan pentingnya penguatan aspek keamanan pangan, pengawasan, serta tata kelola implementasi program. Kasus keracunan yang terjadi justru bertolak belakang dengan tujuan MBG untuk meningkatkan kesehatan, sehingga menegaskan adanya kelemahan dalam pengawasan dan kontrol mutu pangan (Emmanulle,

Saputra, Wicaksono, dkk., 2025). Selain itu, aspek teknis pelaksanaan, termasuk kesiapan infrastruktur sekolah, mekanisme distribusi, dan tata kelola pengadaan bahan makanan menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas MBG (Pratiwi dkk., 2025). Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBG memerlukan perhatian yang serius agar tujuan peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

**Grafik 1. Tren Keracunan Kasus MBG Indonesia (Agustus-Oktober 2025)**



Sumber: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), 2025

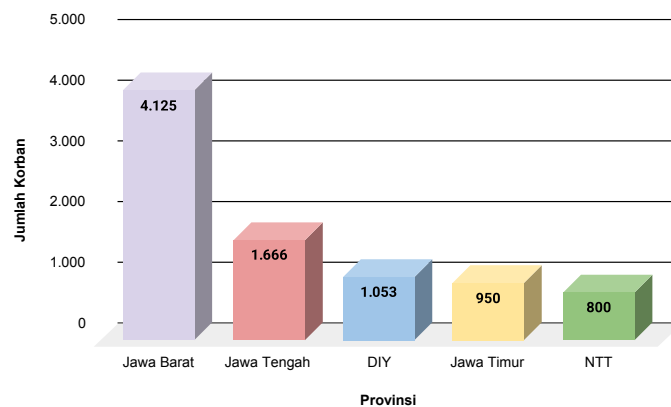
Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (2025), kasus keracunan MBG di Indonesia menunjukkan lonjakan signifikan dari Agustus hingga Oktober 2025. Kasus keracunan sejak Agustus mengalami peningkatan ekstrem pada September, mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek pengawasan mutu, mulai dari pemilihan bahan pangan, standar kebersihan penyajian yang tidak seragam di berbagai wilayah, dan alur pendistribusian makanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG masih memerlukan penguatan, terutama dalam menghadapi cakupan distribusi yang semakin meluas (Nathania, 2025). Selain itu, pelaksanaan MBG belum memiliki dasar hukum khusus yang mengatur, baik dari tata kelola, standar kualitas, pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban prosedur darurat dan ganti rugi yang adil bagi pihak terdampak (Emmanulle, Saputra, Wicaksono, dkk., 2025). Memasuki Oktober 2025, jumlah kasus mengalami peningkatan dan bahkan menjadi puncaknya. Hal ini memperlihatkan apabila evaluasi dan langkah mitigasi yang lebih efektif diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Peningkatan kasus keracunan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG, khususnya bagi siswa sekolah sebagai sasaran utama. Berbagai laporan menunjukkan bahwa insiden keracunan MBG dapat berkaitan dengan kualitas bahan pangan, proses pengolahan yang tidak sesuai standar, maupun distribusi makanan yang kurang memperhatikan aspek higienitas (Emmanulle, Saputra, Wicaksono, dkk., 2025). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, mulai dari proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa tujuan program MBG dalam

meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan baru bagi penerima manfaat.

Berbagai laporan mengenai kasus keracunan MBG di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa isu keamanan pangan masih menjadi tantangan besar di tingkat nasional. Penyiapan makanan maupun bahan pangan tidak sesuai spesifikasi gizi memperlihatkan bahwa mulai dari proses pengolahan, distribusi, dan pengawasan MBG masih perlu diperkuat. Hasil pemeriksaan laboratorium pada beberapa kasus keracunan menunjukkan adanya kontaminasi mikrobiologis maupun kimiawi yang berasal dari bakteri patogen, virus, serta senyawa tertentu yang berpotensi membahayakan (Agustine, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa risiko keamanan pangan dalam program MBG tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan makanan, tetapi juga dengan kepatuhan penyedia makanan terhadap standar higienitas dan keamanan pangan pada setiap tahapan pengolahan dan penyajian.

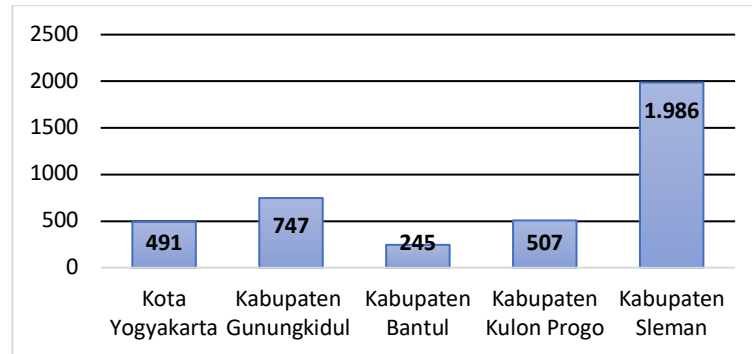
**Grafik 2. Jumlah Korban Keracunan MBG Per Provinsi (Januari - 12 Oktober 2025)**



Sumber: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), 2025

Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (2025), Provinsi DIY termasuk peringkat ketiga nasional dengan kasus keracunan MBG sebesar 1.053 korban. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kasus keracunan MBG di DIY perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat wilayah ini memiliki karakteristik kota pelajar dengan jumlah satuan pendidikan yang cukup besar. Menurut data dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY (2024), jumlah sekolah di Provinsi DIY mencapai 4.903 sekolah, yang menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki cakupan satuan pendidikan yang cukup besar dan tersebar luas. Kondisi tersebut menjadikan DIY sebagai wilayah yang relevan untuk mengkaji implementasi program MBG, khususnya terkait aspek pengawasan, keamanan pangan, dan tata kelola pelaksanaan program. Dengan demikian, DIY dipilih dalam penelitian ini untuk dikaji secara mendalam tingkat kerentanan keracunan MBG dengan menganalisis implementasi program beserta efektivitas pengawasannya.

**Grafik 3. Kasus Pelajar Keracunan MBG di Provinsi DIY  
(Januari-November 2025)**



*Sumber: Data olah peneliti, 2025*

Peneliti menelusuri publikasi media massa dari bulan Oktober hingga 19 November 2025 dengan menggunakan sumber-sumber kredibel yang sudah diakui oleh Dewan Pers, seperti CNN Indonesia, Detik.com, BBC Indonesia, Kompas, Liputan 6, Tempo.co, Harian Jogja, dan Radar Jogja. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan informasi dari portal resmi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman yang memuat informasi terkait dengan jumlah keracunan program MBG. Penelusuran jumlah insiden dilakukan menggunakan kata kunci penelusuran “keracunan MBG di DIY”. Pemberitaan dan publikasi resmi yang digunakan untuk mengakumulasi data kasus keracunan pelajar Provinsi DIY yang telah diolah peneliti di atas berjumlah sepuluh artikel sebab media tersebut memiliki rekam jejak yang kuat dalam menyampaikan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data sekunder.

Berdasarkan grafik yang diolah peneliti, kasus keracunan MBG menunjukkan sebaran yang bervariasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Sleman tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 1.986 kasus, jauh melampaui Gunungkidul, Kulon Progo, Kota Yogyakarta, dan Bantul yang memiliki kasus lebih rendah. Perbedaan angka ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah siswa sekolah, tingkat pengawasan pangan, hingga intensitas kegiatan produksi dan distribusi makanan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa meskipun DIY termasuk wilayah yang luasnya relatif kecil, dinamika keracunan MBG antarwilayah cukup tinggi.

Secara lebih spesifik, kasus di Kota Yogyakarta mencatat 491 kasus keracunan MBG. Meskipun jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten lain di DIY, temuan tersebut menunjukkan bahwa kasus keracunan juga terjadi di wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu, Kota Yogyakarta merupakan pusat kegiatan pendidikan dengan jumlah sekolah dan peserta didik yang relatif besar, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi program MBG. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan MBG di Kota Yogyakarta dengan memahami tantangan yang dapat

menjadi acuan untuk perbaikan implementasi program hingga di wilayah lain. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan pangan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan gizi anak secara lebih menyeluruh.

Beberapa penelitian lain telah membahas program MBG dari berbagai sudut pandang. Penelitian Emmanulle dkk (2025) mengkaji aspek hukum dan kemasyarakatan dalam implementasi MBG yang di mana menunjukkan bahwa keracunan massal sebagai dampak dari lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengadaan. Sementara itu, penelitian Riyanto & Sinaga (2025) menelaah MBG dari sisi hukum dengan fokus penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat dalam kasus keracunan. Meskipun begitu, sebagian besar kajian tersebut belum mengkaji proses implementasi kebijakan secara mendalam dengan pendekatan teoritik yang terstruktur. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam literatur terkait perspektif struktural dan kelembagaan.

Melihat hal tersebut, dalam memahami kompleksitas pelaksanaan program MBG dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Menurut Edward III (1980), penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan penting bagi administrasi publik, termasuk penanganan kebijakan publik. Secara rinci, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Kerangka empat variabel ini saling berkaitan sehingga analisis implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan memahami dinamika pelaksanaan dalam menentukan arah keberlanjutan program MBG.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika implementasi program MBG. Jenis data penelitian diperoleh melalui data primer berupa observasi dan wawancara dengan perwakilan sekolah di Kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder dengan sumber dari dokumen kebijakan terkait, laporan pelaksanaan program, serta berita dan publikasi media daring yang relevan dengan implementasi program MBG. Dari data sekunder tersebut, diperoleh informasi mengenai berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi program di lapangan, seperti Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pemerintah daerah, yakni Wali Kota, Sekretariat Daerah DIY, dan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta yang berperan dalam pengawasan, pelaksanaan teknis, maupun penanganan kasus yang muncul selama implementasi program. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik klasifikasi berdasarkan empat variabel dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis ini memfokuskan pada bagaimana masing-masing variabel memengaruhi efektivitas implementasi program di lapangan. Dengan demikian, studi kasus ini memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program MBG di Kota Yogyakarta.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Komunikasi terhadap Implementasi Program MBG

Komunikasi memegang peran penting sebab kebijakan dapat diimplementasikan dengan lancar apabila informasi mengenai isi kebijakan serta tujuan dapat tersampaikan jelas dan konsisten kepada kelompok sasaran. Pemahaman mengenai implementasi kebijakan akan berjalan efektif jika komunikasi baik sehingga kebijakan perlu disampaikan tepat kepada personalia (Kristian, 2022). Dalam konteks program MBG di Kota Yogyakarta, sosialisasi dan koordinasi antar *stakeholders*, seperti, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, *vendor catering*, dan tim pelaksana MBG di masih terdapat sejumlah kendala komunikasi dan koordinasi. Kendala tersebut terlihat dari perbedaan informasi dan prosedur yang diterima oleh masing-masing pelaksana program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu A pada Mei 2025, selaku perwakilan salah satu sekolah SD Negeri di Kota Yogyakarta, ditemukan bahwa lemahnya komunikasi dalam program MBG antar *stakeholders* muncul karena tidak adanya alur informasi yang jelas, konsisten, dan seragam di berbagai wilayah. Informan menyampaikan bahwa sekolah beberapa kali menerima informasi yang berubah-ubah sehingga menyulitkan mereka untuk menyesuaikan standar pelaksanaan. Di sisi lain, petunjuk teknis rinci terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) juga belum tersedia menyebabkan perbedaan interpretasi di lapangan, baik antara SPPG satu dengan yang lain serta setiap sekolah di Kota Yogyakarta. SOP yang ada di sekolah Ibu A misalnya akan berbeda dengan sekolah lain karena pemahaman dalam implementasi MBG tidak selalu sama dalam menginterpretasikan sebab setiap satuan pendidikan akan menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas masing-masing. Begitupun juga, SPPG antar wilayah juga akan melakukan hal yang sama sebab belum adanya keseragaman SOP. Kondisi tersebut menunjukkan adanya variasi dalam penerapan prosedur teknis di lapangan yang berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing aktor.

Temuan tersebut juga didukung oleh adanya beberapa kasus yang menunjukkan ketidaksesuaian antara standar yang ditetapkan dan praktik pelaksanaan di lapangan. Sejumlah pemberitaan mengungkapkan adanya makanan yang tidak sesuai standar kualitas, termasuk makanan yang telah mengalami penurunan mutu sehingga menimbulkan gangguan kesehatan pada siswa (Roos, 2025). Dalam pelaksanaan MBG di Kota Yogyakarta, salah satu kasus keracunan di SMA Negeri 1 Yogyakarta berasal dari proses produksi makanan dilaporkan tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan karena salah satu juru masak SPPG berhalangan hadir (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025). Temuan ini menunjukkan adanya kendala dalam koordinasi operasional dan pengaturan jadwal kerja di tingkat pelaksana. Alhasil, perubahan kondisi di lapangan berpotensi memengaruhi proses pengolahan makanan.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi dengan informan A, perwakilan salah satu SD Negeri di Kota Yogyakarta, sekolah mengalami keterbatasan informasi terkait beberapa aspek teknis pelaksanaan program MBG. Informan menyampaikan bahwa

masih terdapat hambatan komunikasi antara pihak sekolah, *vendor catering*, dan institusi pelaksana program lainnya, terutama terkait prosedur pemantauan kualitas makanan dan mekanisme pelaporan ketika terjadi kendala di lapangan. Meskipun pihak sekolah telah mengikuti pelatihan dengan SPPG daerah sebanyak dua kali, sekolah masih menyusun panduan pelaksanaan internal untuk mendukung pelaksanaan MBG. Informan juga menyampaikan bahwa program MBG di beberapa sekolah di Kota Yogyakarta sempat diberhentikan tanpa pemberitahuan resmi dari pihak SPPG daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa arus informasi antar *stakeholders* pelaksana belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Dalam perspektif Edward III, temuan ini mengindikasikan bahwa aspek implementasi program MBG di Kota Yogyakarta masih menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

### Pengaruh Sumber Daya terhadap Implementasi Program MBG

Sumber daya menjadi roda penggerak sebuah kebijakan. Meskipun perumusan program direncanakan, tidak akan dapat dijalankan tanpa dukungan sumber daya yang memadai, baik Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten maupun finansial (Ramdani, 2025). Di Kota Yogyakarta, penggelontoran anggaran untuk program MBG mencapai Rp105 miliar justru dapat berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan fiskal (Nurwanto, 2025). Pergeseran alokasi dana secara masif untuk program MBG menyebabkan stagnasi bahkan pemotongan anggaran pada sektor-sektor penting lain sehingga pembangunan dan kesejahteraan di bidang lain ikut terhambat. Meskipun Kota Yogyakarta termasuk daerah perkotaan, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap merasakan dampaknya. Fenomena ini relevan dengan adanya teori alokasi sumber daya dalam implementasi kebijakan, di mana fokus kebijakan yang terlalu sempit dapat menimbulkan *trade-off* terhadap sektor lain (Masruri & Nugraha, 2026). Besarnya alokasi anggaran menuntut adanya sistem transparansi dan akuntabilitas yang kuat untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan program MBG.

Selain itu, terdapat persoalan struktural yang belum diperhatikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, yakni kesiapan dan kompetensi SDM. Terjadinya kasus keracunan melalui makanan basi dan makanan terkontaminasi di wilayah Kota Yogyakarta menunjukkan masih adanya tantangan dalam aspek pengolahan makanan, penyimpanan, dan manajemen distribusi (Irkhami & Prakoso, 2025). Salah satu kasus keracunan MBG di kawasan Kota Yogyakarta yang terjadi di SMA Negeri 1 Yogyakarta menunjukkan bahwa pengolahan makanan tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan karena salah satu juru masak berhalangan hadir, sehingga makanan untuk konsumsi siang dimasak bersamaan dengan jatah pagi (Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025). Selain itu, berdasarkan keterangan dimuat dalam publikasi resmi Pemda DIY tersebut, pihak penyelenggara mengakui adanya kelalaian dalam penyediaan makanan yang diduga tidak sesuai dengan SOP salah satu SPPG di Kota Yogyakarta. Temuan tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan SDM serta belum optimalnya mekanisme operasional ketika terjadi ketidakhadiran tenaga kerja, sehingga proses produksi mengalami perubahan dari jadwal yang seharusnya berlaku. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan

MBG di Kota Yogyakarta masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan SOP, pengendalian mutu pangan, dan pengawasan distribusi makanan.

Di samping itu, program MBG sejak Januari 2025 dilakukan secara bertahap atau *pilot project* dalam penyelenggaraan di beberapa sekolah di Kota Yogyakarta. Seiring dengan perluasan cakupan program, kebutuhan distribusi makanan juga akan akan meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2025), jumlah sekolah di Kota Yogyakarta sendiri mencapai 752. Besarnya cakupan sasaran tersebut menuntut kesiapan sumber daya dan sistem distribusi yang memadai. Dalam pelaksanaannya, distribusi makanan dilakukan setiap hari dengan jumlah penerima yang relatif besar sehingga memerlukan koordinasi, pengawasan, dan manajemen logistik yang efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu A pada Mei 2025, selaku perwakilan salah satu sekolah di Kota Yogyakarta, pernah terjadi kekurangan jumlah makanan yang didistribusikan kepada siswa sehingga diperlukan pengiriman ulang oleh pihak penyedia. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa peningkatan skala distribusi berpotensi menimbulkan kendala operasional apabila tidak diimbangi dengan manajemen rantai pasok, pengawasan, dan dukungan sumber daya yang memadai.

Melihat hal tersebut, temuan di atas dapat diberikan solusi dalam meningkatkan kapasitas SDM, yang di mana peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sangat diperlukan dalam pelaksanaan program MBG. Dinkes Kota Yogyakarta melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan keamanan pangan bagi petugas SPPG, sertifikasi penjamah makanan, supervisi dapur, serta penilaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna memastikan proses pengolahan dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025). Langkah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran dan sarana, tetapi juga pada kompetensi pelaksana dalam menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi pangan.

### **Pengaruh Disposisi terhadap Implementasi Program MBG**

Aspek disposisi atau sikap pelaksana juga menentukan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Disposisi ini merupakan dorongan, hasrat, dan kecenderungan sikap pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh supaya tujuan yang diharapkan dapat terwujud (Hildayanti dkk., 2022). Pada implementasi program MBG, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan yang mengacu pada pedoman dan arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan program tersebut melibatkan hubungan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan nasional di tingkat daerah.

Dalam aspek disposisi, komitmen pelaksana merupakan faktor penting dalam memastikan kebijakan dapat berjalan secara efektif. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan program MBG di Kota Yogyakarta, seperti kasus keracunan makanan. Dalam salah satu kasus yang terjadi di SMA Negeri 1 Yogyakarta, pihak SPPG mengakui adanya kelalaian dalam proses penyediaan makanan yang diduga tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025). Temuan tersebut mengindikasikan

bahwa pelaksanaan program MBG tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dan administratif, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan dan kesungguhan pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, temuan yang ada diperkuat dengan adanya keterangan Kepala Disdikpora DIY yang menyatakan bahwa menu untuk siswa SMA seharusnya diproduksi pada waktu yang berbeda dengan menu siswa SD sesuai jadwal distribusi masing-masing (Setyono, 2025). Namun, dalam pelaksanaannya keduanya diproses secara bersamaan. Hal inilah yang memperlihatkan bahwa prosedur teknis produksi makanan tidak sepenuhnya dijalankan dengan benar. Dalam perspektif disposisi Edward III, kondisi ini menunjukkan bahwa konsistensi sikap pelaksana dalam menerapkan standar operasional menjadi faktor yang turut menentukan efektivitas implementasi kebijakan.

Di samping itu, selain kasus keracunan makanan, hasil wawancara dengan Ibu A pada Mei 2025, selaku perwakilan salah satu sekolah, menunjukkan bahwa pernah terjadi kekurangan jumlah makanan yang didistribusikan kepada siswa, sehingga pihak penyedia perlu melakukan pengiriman ulang. Melihat dari aspek disposisi, tindakan pengiriman ulang tersebut menunjukkan adanya upaya pelaksana untuk tetap memenuhi kebutuhan penerima manfaat ketika terjadi kendala operasional. Namun, munculnya kekurangan distribusi pada tahap awal memperlihatkan bahwa konsistensi pelaksana dalam memastikan ketepatan pelayanan masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi aspek yang penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan (Nggiri dkk., 2025). Dalam pelaksanaan program MBG di Kota Yogyakarta, keterlibatan sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat berperan sebagai sumber informasi dan masukan terhadap kualitas layanan yang diberikan. Hal ini terlihat dari adanya laporan dan keluhan yang disampaikan oleh pihak sekolah maupun orang tua siswa terkait kasus keracunan makanan dan kendala distribusi yang terjadi pada pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Disdikpora DIY, salah satu peran Disdikpora adalah menerima dan meneruskan aduan dari sekolah kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian aspirasi dan pengaduan telah tersedia, namun perlu diperkuat agar berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG di Kota Yogyakarta dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.

### **Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Program MBG**

Struktur birokrasi mencerminkan penganutan sistem pada sebuah organisasi yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Kebijakan publik dapat diimplementasikan jika terdapat otoritas yang diberikan kepada implementor sehingga diperlukan struktur birokrasi yang jelas pada organisasi (Kusuma & Simanungkalit, 2022). Dalam menjalankan kebijakan diperlukan SOP yang berfungsi sebagai acuan bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan yang telah dipilih (Subandi dkk., 2024). Selain itu, dalam struktur birokrasi juga memiliki aspek fragmentasi yang harus dilakukan. Berdasarkan hasil observasi dengan Ibu A pada Mei 2025 di salah

satu sekolah Kota Yogyakarta, terdapat SOP yang dibuat dan disesuaikan oleh tim internal MBG sekolah saja karena hal ini dipengaruhi dengan SOP yang belum terintegrasi, baik dari pihak SPPG atau sekolah di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Akibatnya, pengelola dapur umum SPPG, *vendor catering*, bahkan satuan pendidikan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta memiliki standar masing-masing. Ketiadaan SOP yang terintegrasi di setiap wilayah dapur umum atau *vendor catering* Kota Yogyakarta memicu pelaksana program menjalankan prosedur menurut pemahaman masing-masing pihak, sehingga aspek penting, seperti standar gizi dan keamanan pangan diterapkan secara berbeda-beda.

Selain itu, pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaksana teknis di tingkat sekolah melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Disdikpora DIY pada 7 Mei 2025, Disdikpora DIY memiliki peran yang terbatas pada pendataan sekolah sasaran dan jumlah peserta didik penerima manfaat, serta menerima dan meneruskan aduan dari sekolah kepada instansi yang berwenang. Sementara itu, aspek teknis yang berkaitan dengan pengawasan keamanan pangan, penanganan kesehatan, dan tindak lanjut operasional berada pada instansi lain yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya fragmentasi kewenangan dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini juga terlihat dari keterlibatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang memiliki fungsi pengawasan keamanan pangan melalui supervisi, sertifikasi, dan pemantauan proses pengolahan makanan pada SPPG (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025). Pembagian fungsi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG melibatkan koordinasi lintas instansi, di mana aspek keamanan pangan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, sedangkan pelaksanaan operasional berada pada SPPG dan instansi terkait lainnya. Dengan demikian, efektivitas implementasi program bergantung pada koordinasi antar *stakeholders* agar proses pengawasan dan penanganan masalah dapat berjalan secara terintegrasi.

Temuan tersebut juga terlihat dalam kasus keracunan MBG di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Pada laporan menunjukkan bahwa proses produksi makanan mengalami perubahan jadwal akibat ketidakhadiran salah satu juru masak, sehingga makanan untuk konsumsi siang diproses bersamaan dengan jatah pagi, sehingga tidak sesuai dengan SOP yang tersedia (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025). Peristiwa tersebut mengindikasikan bahwa prosedur operasional dalam menghadapi kondisi darurat atau kekurangan personel SPPG belum berjalan secara optimal. Komisi D DPRD Kota Yogyakarta juga menyoroti perlunya pembenahan sistem pengelolaan SPPG, terutama terkait manajemen produksi dan distribusi makanan pasca banyaknya kasus keracunan di Kota Yogyakarta (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, 2025). Tidak tersedianya mekanisme prosedur penggantian petugas ketika ada yang absen belum berjalan secara efektif, sehingga menyebabkan proses produksi tidak berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi SPPG belum didukung oleh mekanisme operasional yang mampu menjamin keberlangsungan layanan ketika terjadi hambatan dalam proses pelaksanaan. Setelah insiden terjadi, Wali Kota Yogyakarta menghentikan sementara operasional SPPG dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut

terhadap proses penyelenggaraan program (Setyono, 2025). Keterlibatan pemerintah daerah, SPPG, Dinas Kesehatan, dan satuan pendidikan dalam proses penanganan menunjukkan bahwa implementasi MBG melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan yang saling berkaitan.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh respons Sekretariat Daerah DIY pasca kasus keracunan MBG di salah satu sekolah Kota Yogyakarta. Sekretaris Daerah DIY menyampaikan bahwa penanganan kasus dilakukan melalui koordinasi dengan Satgas MBG dan SPPG, disertai kewajiban pelaporan rutin serta penguatan sertifikasi keamanan pangan bagi penyelenggara program (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025). Keterlibatan berbagai instansi dalam proses penanganan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG melibatkan pembagian kewenangan yang tersebar pada beberapa organisasi, sehingga memerlukan mekanisme koordinasi yang terintegrasi agar proses pengawasan dan penanganan masalah dapat berjalan efektif. Dalam kasus keracunan MBG di Kota Yogyakarta, keterlibatan berbagai instansi dengan kewenangan yang berbeda menunjukkan pentingnya koordinasi yang jelas dalam penanganan risiko program. Selain itu, penerapan SOP yang belum sepenuhnya seragam di berbagai wilayah Kota Yogyakarta berpotensi menimbulkan perbedaan praktik operasional di lapangan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan respons terhadap permasalahan yang muncul selama implementasi program. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar *stakeholders*, penyelarasan SOP, serta kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab perlu dilakukan untuk mendukung efektivitas program MBG di Kota Yogyakarta.

### Implikasi terhadap Keberhasilan Kebijakan

Melalui analisis pendekatan George C. Edward III (1980) di atas menunjukkan bahwa tantangan implementasi program MBG Kota Yogyakarta tidak semata-mata disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil dari beberapa penyebab yang kompleks, yaitu komunikasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, khususnya dalam aspek kapasitas pelaksana, disposisi pelaksana yang masih perlu diperkuat, serta struktur birokrasi yang memerlukan koordinasi dan penerapan SOP yang lebih terintegrasi. Sebagai bentuk penyederhanaan hasil pembahasan, berikut disajikan tabel ringkas mengenai temuan utama penelitian terkait implementasi program MBG di Kota Yogyakarta.

**Tabel 1. Hasil Analisis Pelaksanaan MBG di Kota Yogyakarta**

Indikator	Permasalahan yang Muncul	Penjelasan
Komunikasi	a. Komunikasi tidak efektif antar aktor	Penyampaian informasi antar pelaksana program MBG belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga masih terdapat perbedaan pemahaman terkait petunjuk teknis, prosedur pelaksanaan, dan kewenangan masing-masing aktor. Kondisi ini berpotensi menghambat koordinasi dalam implementasi program.

Indikator	Permasalahan yang Muncul	Penjelasan
	b. Informasi belum konsisten	Terjadi penghentian sementara MBG tanpa pemberitahuan resmi dan belum seragamnya prosedur menyebabkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan MBG.
Sumber Daya	a. Pengalihan anggaran untuk MBG	Pengalokasian anggaran MBG sebesar Rp105 miliar berpotensi memengaruhi distribusi anggaran pada sektor lain. Selain itu, besarnya anggaran yang dikelola memerlukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan program.
	b. Keterbatasan SDM yang kompeten	Beberapa kasus keracunan makanan dan kendala distribusi menunjukkan masih adanya tantangan dalam aspek pengolahan makanan, pengendalian mutu pangan, dan manajemen distribusi. Ketidakhadiran juru masak yang menyebabkan perubahan jadwal produksi makanan juga menunjukkan belum optimalnya kesiapan SDM dan mekanisme penggantian personel dalam operasional SPPG.
Disposisi	Konsistensi pelaksanaan kebijakan	Program MBG tetap dilaksanakan sesuai arahan dan pedoman yang ditetapkan pemerintah. Namun, adanya pengakuan kelalaian oleh SPPG serta pelaksanaan produksi makanan yang tidak sesuai jadwal menunjukkan bahwa penerapan prosedur operasional belum sepenuhnya konsisten. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kepatuhan pelaksana terhadap standar yang telah ditetapkan untuk mendukung efektivitas program.
Struktur Birokrasi	a. SOP belum terintegrasi antar wilayah dan satuan pendidikan	Berdasarkan hasil observasi, beberapa satuan pendidikan menyesuaikan SOP pelaksanaan MBG dengan kebutuhan masing-masing. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapan prosedur operasional,

Indikator	Permasalahan yang Muncul	Penjelasan
		termasuk pada aspek distribusi dan keamanan pangan.
	b. Fragmentasi kelembagaan antar <i>stakeholders</i>	Keterlibatan berbagai instansi dengan kewenangan yang berbeda menunjukkan pentingnya kejelasan mekanisme koordinasi dan penanganan risiko program MBG, seperti keracunan. Kondisi ini memerlukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih terintegrasi agar proses pengawasan dan penanganan permasalahan dapat berjalan secara efektif.
	c. Mekanisme operasional darurat belum optimal	Perubahan jadwal produksi akibat ketidakhadiran juru masak menunjukkan bahwa prosedur penggantian personel dan keberlangsungan operasional ketika terjadi kendala belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program.

Sumber: Data olah peneliti, 2025

Ketidakhadiran sinergi antara variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berpotensi menghambat efektivitas implementasi program MBG di Kota Yogyakarta. Meskipun program ini memiliki tujuan yang strategis dalam meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik, berbagai kendala yang ditemukan menunjukkan masih adanya tantangan dalam pelaksanaannya. Apabila berbagai permasalahan tersebut tidak ditangani secara memadai, implementasi program berisiko mengalami penurunan efektivitas serta mengurangi kualitas layanan yang diterima oleh kelompok sasaran. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara perumusan kebijakan di tingkat pusat dan pelaksanaannya di tingkat daerah memerlukan koordinasi yang lebih kuat agar pelaksanaan program dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG menjadi salah satu indikasi pentingnya penguatan pengawasan kualitas pangan, koordinasi antar *stakeholders*, serta kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam program.

Selain itu, pelaksanaan program MBG menunjukkan pentingnya keterpaduan antara perumusan kebijakan dan kesiapan implementasi di lapangan. Kebijakan yang dirancang secara nasional memerlukan dukungan sumber daya, koordinasi, serta mekanisme pengawasan yang memadai agar dapat berjalan secara efektif di tingkat daerah. Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan perlu mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, karakteristik daerah, serta masukan dari berbagai pemangku

kepentingan yang terlibat. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan program, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan dinamika yang berkembang di lapangan secara berkelanjutan.

### Perbandingan Implementasi Program Serupa di Negara Lain

Dengan melihat berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia terkait program MBG, pengalaman Korea Selatan dalam menyiapkan makan bergizi dapat menjadi rujukan penting. Korea Selatan telah mengembangkan program makan sekolah sejak masa pasca perang Korea tahun 1953, ketika United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dan United States Agency for International Development (USAID) menyalurkan bantuan 40 juta pon susu bubuk dan kedelai bagi siswa yang dilanda kelaparan dampak perang. Akan tetapi, pada saat itu juga sempat terjadi insiden para siswa mengalami keracunan makanan sehingga sistem layanan makanan sekolah berbasis roti dihapuskan oleh Pemerintah Korea. Melihat adanya insiden tersebut, Pemerintah Korea sejak 1978 mulai menempatkan ahli gizi di sekolah untuk memberikan edukasi gizi melalui penyiaran dan materi pembelajaran. Seiring waktu, program ini berkembang pada 1981 dengan memberlakukan Undang-Undang Makanan Sekolah untuk menggeser tujuan dari sekadar mengatasi kelaparan menjadi bantuan penyediaan gizi seimbang dan penetapan SOP dalam penyediaan makanan. Kemudian, pada 1997 seluruh siswa sekolah dasar sekitar 65,4% mulai memperoleh makan siang.

Di samping itu, sebelum tahun 2010, penyediaan makan siang di Korea Selatan masih berbasis *means-tested*, yakni hanya siswa dari keluarga miskin yang berhak menerima. Alhasil, penerima makan di sekolah sekitar seperlima dari total siswa. Lambat laun, tekanan masyarakat sipil dan partai oposisi menghendaki keadilan sosial mendorong lahirnya *Free School Meal Program (FMSP)* pada tahun 2011, yang menjadikan makan gratis bersifat universal bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi. Pendanaan pada FMSP berasal dari anggaran pemerintah yang dialokasikan melalui proses kompleks dengan menyeimbangkan konsensus politik dan opini publik karena sumber daya harus didistribusikan secara adil di berbagai wilayah serta kelompok demografis (Pasha dkk., 2025). Program FMSP di Korea Selatan diimplementasikan dengan model semi-desentralisasi, di mana meskipun terdapat peran pengawasan dan dukungan dari kementerian pendidikan, sekolah tetap memiliki tanggung jawab langsung dalam pengadaan bahan makanan. Dalam praktiknya, banyak sekolah secara mandiri membeli bahan makanan dan menyiapkan pengolahan sendiri atau bekerja sama dengan penyedia lokal sehingga tidak seluruh makanan harus diproduksi dari dapur terpusat nasional (Global Child Nutrition Foundation, 2024).

Implementasi program FMSP berlangsung dalam konteks politik terdapat perspektif yang berbeda antara partai konservatif dan partai progresif. Partai konservatif menghendaki agar program ini dapat dibatasi cakupannya karena khawatir akan beban fiskal, sedangkan partai progresif serta orang tua siswa mendorong perluasan program. Meskipun terjadi beberapa intervensi politik, Pemerintah Korea Selatan justru mengembangkan program FMSP dengan pembuatan sistem yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyediaan makanan.

The Physical Activity Promotion System (PAPS) yang dikembangkan Kementerian Pendidikan Korea Selatan merupakan platform berbasis website untuk mengukur dan meningkatkan kebugaran siswa. Melalui sistem ini, siswa diuji dalam lima aspek, yakni daya tahan kardiorespirasi, kekuatan otot, fleksibilitas, kecepatan, dan lemak tubuh lalu diklasifikasikan berdasarkan skor dengan hasil yang dapat diakses secara daring untuk memantau kondisi, memperbaiki kebiasaan makan, serta mendapatkan rekomendasi aktivitas fisik dari sekolah dan dukungan orang tua. Akhirnya, jumlah sekolah yang mengadopsi program FMSP meluas hingga sekolah menengah pertama dan menengah ke atas melonjak dari 1.812 (16,2%) pada 2009 menjadi 8.351 (72,7%) pada 2014 (Baek dkk., 2019). Keberhasilan Korea Selatan dalam program FMSP ini ditandai dengan penempatan resmi guru seputar gizi pada Februari 2019 tercatat 10.304 guru gizi telah ditempatkan di 10.513 sekolah.

Melihat pelaksanaan *Free School Meal Program* (FSMP) di Korea Selatan yang dapat belajar dari sebuah insiden keracunan untuk dijadikan evaluasi, Indonesia seharusnya dapat mencontoh hal tersebut dalam program MBG. Program MBG di Indonesia saat ini masih digerakkan oleh janji politik pemerintah baru sebagai salah satu program prioritas nasional (Febrian dkk., 2025). Skema yang dirancang pada program ini langsung mengarah pada model universal, di mana semua siswa SD, SMP, dan SMA memperoleh makanan bergizi tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Dari aspek tujuan, program MBG ini jelas sejalan dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui pemenuhan gizi. Namun, berbeda dengan Korea Selatan yang merintis program makan sekolah dengan *history* dukungan UNICEF dan USAID lalu melakukan transformasi secara bertahap menjadi universal. Sedangkan Indonesia sendiri implementasi program MBG langsung melompat pada skala yang besar sehingga menghadapi tantangan serius dalam hal kesiapan anggaran, pengolahan, distribusi makanan, hingga pengawasan kualitas gizi. Terlebih lagi, keberhasilan Korea Selatan ini juga telah memiliki kelembagaan yang kuat, seperti adanya penempatan guru gizi resmi yang tersebar di sekolah dan juga terdapat PAPS sebagai sistem evaluasi kebugaran siswa. Hal ini membuktikan bahwa program makan gratis tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, melainkan juga terintegrasi dengan edukasi gizi dan kesehatan fisik sasaran penerima. Dalam program MBG di Indonesia masih belum memiliki kelembagaan sekuat Korea Selatan dan adanya insiden keracunan yang kian melonjak juga tidak direspons responsif oleh *stakeholders* terkait.

Dari pengalaman Korea Selatan, Indonesia perlu belajar bahwa keberhasilan sebuah program makan gratis tidak hanya ditentukan oleh luasnya cakupan, tetapi juga oleh kualitas implementasi, alokasi anggaran yang bijak, serta memiliki integrasi antara program kesehatan dengan pendidikan di sekolah. Adanya sistem PAPS di Korea ini menjadi mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk menilai dampak terhadap kebugaran siswa, memberikan umpan balik, serta melibatkan peran sekolah dan orang tua dalam mendukung gaya hidup sehat para siswa. Dengan memahami tantangan dan melaksanakan evaluasi program MBG maka keberhasilan akan dapat dicapai dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Qomarrullah dkk., 2025). Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dapat mengambil sisi positif pelaksanaan FSMP di Korea Selatan supaya implementasi dan keberlanjutan program MBG dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan mulia yang hendak dicapai.

### Rekomendasi dalam Perbaikan Implementasi Program MBG

Berdasarkan hasil analisis implementasi Program MBG di Kota Yogyakarta, perbaikan kebijakan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, serta sistem pembagian jadwal agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, aman, dan terkoordinasi. Pada aspek komunikasi, diperlukan penguatan sistem informasi terpusat yang menjadi rujukan resmi seluruh pelaksana program, termasuk SPPG, sekolah, vendor catering, dan perangkat daerah terkait. Sistem ini perlu memuat SOP terbaru, jadwal produksi dan distribusi, serta mekanisme pelaporan yang terintegrasi agar tidak terjadi perbedaan informasi dan interpretasi di lapangan. Selain itu, forum koordinasi rutin lintas stakeholder perlu dioptimalkan untuk memastikan setiap perubahan kebijakan tersampaikan secara konsisten.

Selanjutnya, pada aspek sumber daya, peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama melalui pelatihan berkala terkait keamanan pangan, higiene sanitasi, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan. Sertifikasi penjamah makanan serta audit dan supervisi rutin oleh Dinas Kesehatan juga perlu diperkuat untuk memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar keamanan pangan. Selain itu, penguatan manajemen logistik diperlukan untuk mengantisipasi potensi kekurangan distribusi seiring meningkatnya cakupan penerima manfaat. Kemudian, pada aspek disposisi, diperlukan penguatan komitmen dan kedisiplinan pelaksana dalam menerapkan SOP secara konsisten, terutama terkait ketepatan produksi, kualitas makanan, dan respons terhadap kendala operasional. Mekanisme pengawasan berbasis kinerja serta sistem insentif dan sanksi perlu diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksana. Di sisi lain, partisipasi sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu diformalkan melalui kanal pengaduan yang responsif agar setiap permasalahan dapat segera ditindaklanjuti.

Pada aspek struktur birokrasi, diperlukan penyusunan SOP terpadu yang seragam di seluruh wilayah Kota Yogyakarta yang mengatur secara jelas proses produksi, distribusi, pengawasan, dan penanganan insiden. Pembagian tugas antarinstansi seperti Disdikpora, Dinas Kesehatan, SPPG, dan pemerintah daerah juga perlu diperjelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Pembentukan tim koordinasi terpadu MBG dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinkronisasi antaraktor. Selain itu, pada aspek operasional, perlu diterapkan sistem pembagian jadwal produksi dan distribusi yang lebih ketat, terstandarisasi, dan terdigitalisasi. Jadwal harus disusun berdasarkan jenjang pendidikan, kapasitas produksi harian, serta waktu distribusi yang jelas untuk masing-masing sekolah. Untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti ketidakhadiran tenaga kerja, perlu disiapkan jadwal cadangan (*backup schedule*) agar tidak terjadi perubahan proses produksi yang dapat memengaruhi kualitas makanan. Pengawasan terhadap kepatuhan jadwal harus diperkuat oleh instansi pengawas agar seluruh tahapan berjalan sesuai standar. Dengan penguatan seluruh aspek tersebut secara terintegrasi, diharapkan implementasi Program MBG di Kota Yogyakarta dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan mampu menjamin kualitas serta keamanan layanan bagi seluruh penerima manfaat.

## PENUTUP

Implementasi program MBG di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan efektif berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan George C. Edward III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, masih ditemukan kendala dalam koordinasi dan penyampaian informasi antarpelaksana program yang berdampak pada belum optimalnya keseragaman pemahaman, sehingga diperlukan penguatan sistem informasi dan koordinasi yang lebih terpusat. Dari aspek sumber daya, kasus keracunan makanan dan kendala distribusi menunjukkan perlunya penguatan kapasitas pelaksana, khususnya dalam keamanan pangan, pengelolaan distribusi, serta pengaturan jadwal produksi dan penyaluran makanan yang lebih terstandarisasi. Sementara itu, aspek disposisi menunjukkan pentingnya peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan dan evaluasi program, sedangkan pada aspek struktur birokrasi masih terdapat tantangan terkait kejelasan koordinasi, pembagian tugas, serta penerapan SOP yang belum sepenuhnya konsisten dan terintegrasi.

Berdasarkan temuan tersebut, upaya perbaikan implementasi program MBG di Kota Yogyakarta perlu difokuskan pada penguatan koordinasi antaraktor melalui sistem komunikasi yang terpusat, peningkatan kompetensi pelaksana melalui pelatihan dan pengawasan keamanan pangan, perluasan mekanisme partisipasi dan umpan balik masyarakat, serta penyelarasan SOP yang seragam disertai kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi. Selain itu, diperlukan penguatan pengaturan jadwal produksi dan distribusi secara lebih sistematis agar pelaksanaan di lapangan berjalan lebih tertib, tepat waktu, dan sesuai standar operasional. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program yang lebih efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Dengan demikian, tujuan program MBG dalam mendukung pemenuhan gizi siswa dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para informan terkait, baik perwakilan salah satu sekolah di Kota Yogyakarta dan Sekretaris Disdikpora DIY. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yakni Ibu Ashilly Achidsti dalam membantu penulisan penelitian ini.

## Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhisatya, A. P., & Firdaus, S. U. (2021). Penerapan Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Res Publica*, 5(3).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/respublica.v5i3.58461>

- Agustine, I. (2025, Oktober 9). Ungkap Penyebab Keracunan MBG, Pakar UGM Beri Tips Cara Beri Pertolongan Pertama Keracunan Makanan. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/ungkap-penyebab-keracunan-mbg-pakar-ugm-beri-tips-cara-beri-pertolongan-pertama-keracunan-makanan/>
- Baek, D., Choi, Y., & Lee, H. (2019). Universal Welfare May Be Costly: Evidence from School Meal Programs and Student Fitness in South Korea. *Sustainability*, 11(5), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su11051290>
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. (2025, Oktober 20). *Komisi D DPRD Kota Jogja Soroti Kasus Keracunan MBG di SMAN 1*. <https://dprd.jogjakota.go.id/detail/index/43817/komisi-d-dprd-kota-jogja-soroti-kasus-keracunan-mbg-di-sman-1-2025-10-20>
- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. (2025, Oktober 27). *Pencegahan Dini dan Kewaspadaan Keracunan Pangan Program MBG*. <https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/680>
- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY. (2024). *Jumlah Sekolah di Provinsi DIY [Dataset]*
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Emmanulle, K. F. V., Saputra, R. A., Wicaksono, A. S. P. Y., Wicaksana, D. P., & Kamal, U. (2025). Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 1329–1342. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/534>
- Emmanulle, K. F. V., Saputra, R. A., Yuda, A. S. P., Wicaksana, D. P., & Kamal, U. (2025). *Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang*. 01(04).
- Fauzi, A. R., Nugroho, A. F. T., Sitio, H. F. S., Prameswari, D., & Lestari, N. S. (2026). Implementasi Future Skills ASN Menuju Indonesia Emas 2045 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2), 294–305. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1902>

- Febrian, M. D., Munjazi, T. R., & Al-mubarak, M. I. (2025). Partisipasi Aktor Politik dalam Wacana Makan Bergizi Gratis: Tinjauan Literatur atas Kepentingan Politik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2338>
- Global Child Nutrition Foundation. (2024). *Global Survey of School Meal Programs country report: South Korea (2022–2023 school year)*. [https://gcnf.org/wp-content/uploads/2024/12/South\\_Korea\\_2024\\_Report\\_R6.pdf](https://gcnf.org/wp-content/uploads/2024/12/South_Korea_2024_Report_R6.pdf)
- Hildayanti, H., Parawangi, A., & Rasdiana, R. (2022). Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara (JIAN)*, 3(6), 1673–1668. <https://doi.org/https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/10447>
- Irkhami, A. L., & Prakoso, A. D. (2025, Oktober 17). Pasca Kembali Keracunan Massal, Dewan Dorong Pemkot Jogja Intervensi Pengawasan Dapur MBG. *radarjogja.jawapos.com*. [https://radarjogja.jawapos.com/news/656714928/pasca-kembali-keracunan-massal-dewan-dorong-pemkot-jogja-intervensi-pengawasan-dapur-mbg#google\\_vignette](https://radarjogja.jawapos.com/news/656714928/pasca-kembali-keracunan-massal-dewan-dorong-pemkot-jogja-intervensi-pengawasan-dapur-mbg#google_vignette)
- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2025). *Jumlah Korban Keracunan Makan Bergizi Gratis Bulan September-Oktober 2025 [Dataset]*
- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2025). *Jumlah Korban Keracunan Makan Bergizi Gratis Per Provinsi Bulan Januari-12 Oktober 2025 [Dataset]*
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Jumlah Sekolah di Kota Yogyakarta [Dataset]*
- Kristian, I. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 23–37. <https://doi.org/10.25157/dak.v9i1.6621>
- Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>

- Masruri, G., & Nugraha, H. (2026). Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Politik Janji Pemilu: Analisis Kebijakan Anggaran dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan Indonesia dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 12100–12108. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5441>
- Nathania, K. D. (2025, Oktober 6). Keracunan Massal MBG, PKT UGM Sebut Skala Produksi SPPG Melebihi Kapasitas dan Minimnya Pengawasan. *ugm.ac.id*. <https://ugm.ac.id/id/berita/keracunan-massal-mbg-pkt-ugm-sebut-skala-produksi-sppg-melebihi-kapasitas-dan-minimnya-pengawasan/>
- Nggiri, M. T., Nursalam, N., & Long, B. L. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Oebafok. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 72–87. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5011>
- Nurwanto, I. (2025, Januari 6). Anggaran MBG di Kota Jogja Capai Rp 105 Miliar, Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Oleg Yohan: Baru untuk Delapan Bulan, Belum Satu Tahun. *radarjogja.jawapos.com*. <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/655495934/anggaran-mbg-di-kota-jogja-capai-rp-105-miliar-anggota-komisi-b-dprd-kota-jogja-oleg-yohan-baru-untuk-delapan-bulan-belum-satu-tahun>
- Pasha, J. A., Mauludi, T. H., Imam, M., & Muhyidin, A. (2025). Free school meals policy: How are they governed? comparing India, the USA, Japan, and South Korea. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 35–54. <https://doi.org/10.26618/ojip.v15i1.16298>
- Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025, Oktober 16). Keracunan MBG SMA Teladan, SPPG Wajib Lakukan Laporan Rutin dan Sertifikasi. <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/keracunan-mbg-sma-teladan-sppg-wajib-lakukan-laporan-rutin-dan-sertifikasi>
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025, Oktober 16). Keracunan MBG SMA Teladan, SPPG Wajib Lakukan Laporan Rutin dan Sertifikasi.

- <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/keracunan-mbg-sma-teladan-sppg-wajib-lakukan-laporan-rutin-dan-sertifikasi>
- Pratiwi, A., Sipangkar, S. W. R., Ramadhani, A. N. R., Mulyady, S., Hylmi, M. R., & Rahmawati, R. (2025). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Kerangka Teori Mandat Hanna F. Pitkin. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v7i10.12252>
- Qomarrullah, R., Suratni, S., S, L. W., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i2.660>
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2855–2866. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/380>
- Ramdani, R. S. (2025). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan di Pasar Masomba Kota Palu. *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(02), 1–14. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jsip/id/article/view/1752>
- Riyanto, O. S., & Sinaga, M. R. E. (2025). Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau dari Tanggung Jawab Negara. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.84>
- Roos, D. O. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Sebagai Utopia/Distopia (Studi Hermeneutika Kekuasaan). *HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 19(1), 29–43. <https://e-jurnal.stiaalazka.ac.id/index.php/ojs-hipotesa/article/view/108>
- Salsabila, P. S., & Nareswari, S. (2023). Pengaruh Sarapan terhadap Konsentrasi Belajar. *Medical Profession Journal of Lampung*, 13(1), 146–150. <https://doi.org/10.53089/medula.v13i1.593>
- Sarjito, A. (2024). Free Nutritious Meal Program as a Human Resource Development Strategy to Support National Defence. *International Journal Administration, Business & Organization*, 5(5), 129–141. <https://doi.org/10.61242/ijabo.24.454>

- Setyono, K. (2025, Oktober 16). 426 Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan MBG, Wali Kota Langsung Tutup SPPG. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/regional/read/6186724/426-siswa-sman-1-yogyakarta-keracunan-mbg-wali-kota-langsung-tutup-sppg>
- Subandi, S., Rahmawati, E., & Inayati, H. (2024). Pemahaman Konseptual tentang Standard Operating Procedure (SOP) Dasar, Tujuan, Manfaat, dan Penerapan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6), 1–13. <https://doi.org/10.62281/v2i6.394>

### Tentang Penulis

**Kurnia Gischa Tristiya** adalah mahasiswa Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta.

**Ashilly Achidsti** adalah dosen Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta